PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA CIWARENG KECAMATAN BABAKAN CIKAO KABUPATEN PURWAKARTA (Suatu Studi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012)

Raenaldi Wibisono

Abstrak

Partisipasi politik masyarakat dalam melakukan pemilihan umum kepala daerah merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Adapun indikasi masalah yang ada saat ini yaitu tidak berjalanya dengan optimal partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana partisipasi politik masyarakat diDesa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta pada pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2012. Partisipasi politik masyarakat Ciwareng Kabupaten purwakarta dalam pemilihan kepala daerah dianalisis mengunakan teori dari Mirriam Budiarjo yaitu proses pemberian suara, menghadiri rapat umum, hubungan dengan pejabat pemerintah, menjadi anggota partai politik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ni yaitu melalui studi pustaka, observasi, wawancara serta dokumentasi. Tekhnik informan yang digunakan adalah *purposive*

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa partisipasi politik masyarakat di Desa Ciwareng dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2012 di Kabupaten Purwakarta masih banyak dipengaruhi oleh kelompok kepentingan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemberian suara masyarakat desa Ciwareng dalam memberikan suaranya yang masih kurang maksimal. Ketidak hairnya masyarakat dalam menghadiri rapat umum, serta kurangnya hubungan masyarakat Desa Ciwareng dengan pejabat setempat yang menyebabkan kurangnya pemberian suara dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2012 lalu.

Kata kunci: partisipasi politik, pilkada, pemilu

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Sebagai konsekuensi negara demokrasi, Indonesia telah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum (Pemilu) secara reguler, yaitu Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009 untuk pemilihan calon legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres). Secara spesifik dunia internasional memuji, bahwa Pemilu Tahun 1999 sebagai Pemilu pertama di era Reformasi yang telah berlangsung secara aman, tertib, jujur, dan adil dipandang memenuhi standar demokrasi global dengan tingkat partisipasi politik 92,7%, sehingga Indonesia dinilai telah melakukan lompatan demokrasi.

Namun jika dilihat dari aspek partisipasi politik dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia, Pemilu tahun 1999 merupakan awal dari penurunan tingkat partisipasi politik pemilih, atau mulai meningkatnya golongan putih (golput), dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya dengan tingkat partisipasi politik pemilih tertinggi 96,6% pada Pemilu tahun 1971. Lebih-lebih jika dinilai dengan penyelenggaraan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) sebagai bagian dari Pemilu yang telah berlangsung di beberapa daerah, terutama di wilayah Jawa sebagai konsentrasi mayoritas penduduk Indonesia juga menunjukkan potensi Golput yang besar berkisar 32% sampai 41,5%. Realitas tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih, di saat arus demokratisasi dan kebebasan berpolitik masyarakat sedang marak-maraknya

Demokrasi di negara kita telah berlangsung semenjak berdirinya Republik Indonesia dengan masalah pokok yang sangat beraneka ragam seperti budaya, tingkat kehidupan ekonomi dan juga membina kehidupan sosial dan politik. Di dalam kehidupan politik hal tersebut di tandai dengan dilaksanakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, begitu pula pelaksanaan demokrasi di desa telah berlangsung sejak lama, apalagi di era reformasi yang ditandai dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah serta diamandemennya UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan tujuan semua daerah dapat mandiri dalam berbagai bidang termasuk dalam segi politik.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus kepentingan sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan khususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan ±18.110 pulau yang dimilikinya, dengan begitu banyaknya kecamatan dan juga banyaknya beberapa pedesaan yang tersebar di beberapa pulau tersebut. Salah satu contoh Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao yang terletak disalah satu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Purwakarta adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia terletak ±80 km sebelah timur Jakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kerawang di bagian Barat dan sebagian wilayah utara, Kabupaten Bandung di bagian selatan, dan Kabupaten Cianjur di bagian Barat Daya.

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung menjadi kebutuhan rakyat yang utama dalam upaya mengoreksi terjadinya penyimpangan penerapan otonomi daerah yang ditujukan para elit ditingkat lokal. Asumsi bahwa otonomi daerah akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam banyak kasus ternyata hanya janji kosong yang tidak terbukti kebenarannya, yang terjadi justru maraknya perilaku elit Lokal baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif yang lebih mempertontonkan dan mengutamakan kepentingan pribadi dari

pada untuk kepentingan masyarakat luas seperti yang ditunjukkan dengan maraknya politik uang *(money politicy)* dan dominannya kepentingan partai politik dibandingkan dengan kepentingan masyarakat luas.

Pilkada langsung merupakan sarana yang paling tepat digunakan oleh masyarakat saat ini, guna menyeleksi calon-calon pemimpin yang mampu membawa perubahan, kemajuan, dan perkembangan bagi daerah dan masyarakatnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Pilkada dapat menjadi kunci penentu keberhasilan pencapaian tujuan, manakala masyarakat secara sadar dan bertanggung jawab mampu mengamati visi dan misi kandidat Kepala Daerah ketika menyampaikan program kampanye, dengan mengetahui latar belakang riwayat hidup kandidat, sampai memutuskan calon Kepala Daerah yang akan dipilih.

Kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Ada banyak bentuk partisipasi politik, diantaranya melalui pemberian suara (*voting behavior*), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik dan lain sebagainya. Perilaku politik masyarakat dapat dilihat ketika masyarakat tersebut ikut berpartisipasi, misalnya dalam pemilu, Rakyat membuat kontrak sosial dengan para pemimpin melalui pemilu. Pada saat pemilu rakyat dapat memilih figure yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif.

Partisipasi warga/rakyat negara dapat dilihat melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui partai politik, kampanye, pemberian suara. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Termasuk di dalamnya pada pemillihan Presiden tahun 2009 yang lalu. Rakyat ikut berpartisipasi di dalam pemilihan Presiden secara langsung untuk memilih siapa yang akan menduduki pemerintahan Indonesia untuk lima tahun ke depannya.

Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kadaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui pemungutan suara. Proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi, persiapan, pemilihan, penyelenggaraaan pemilihan, penetapan politik, pendanaan dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Hal tersebut di atas pada umumnya dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang diatur melalui Undang-Undang. Antusias masyarakat akan terlihat pada saat pemilihan umum akan berlangsung yaitu dari mulai penetapan calon, kampanye hingga pemilihan berlangsung.

Partisipasi politik merupakan keikutsertaan, dalam konteks hal politik ini mengacu pada keikutsertaan masyarakat dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan seperti memberikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan dan menjadi anggota politik.

Kabupaten Purwakarta sabagai salah satu kabupaten yang mempunyai peranan cukup penting dalam perkembangan politik di Indonesia. Salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi masih banyak juga masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya yang tentunya akan menjadi masalah.

Masyarakat Kabupaten Purwakarta pada bulan Desember tepatnya tanggal 15 Desember 2012 sudah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta periode 2013/2018 secara langsung. Pertarungan pada pemilihan umum kepala daerah tahun ini sangat menegangkan, melihat tiga pasang calon bupati ini bukan pemain baru, atau bisa disebut sebagai aktor yang baru keluar dilingkungan dan pertarungan politik Kabupaten Purwakarta. Luas wilayah Kabupaten Purwakarta adalah 971,72 km² atau sekira 2,81% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat berpenduduk 845.509 jiwa (Proyeksi jumlah penduduk tahun 2009) dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,28% per-tahun. Jumlah penduduk laki-laki adalah 420.380 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 425.129 jiwa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memperjelas fokus masalah yang akan ditulis dalam penelitian ini. Peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana partisipasi politik masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2012?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah khususnya di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2012. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemberian suara dalam pemilihan Kepala Daerah masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui keikutsertaan masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta dalam menghadiri rapat umum terkait pemilihan Kepala Daerah Purwakarta Tahun 2012?
3. Untuk mengetahui hubungan pejabat pemerintah dengan masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta dalam proses pemilihan kepala daerah tahun 2012?
4. Untuk mengetahui anggota partai politik yang ada di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta pada proses pemilihan umum kepala daerah tahun 2012?

1.4 Kegunaan Penelitian

Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dari segi ilmiah, teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Bagi kepentingan peneliti, hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengalaman, wawasan dan memahami partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, sehingga mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian fakta di lapangan dengan teori yang ada.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dari teori mengenai partisipasi politik yang dikemukakan para ahli dan dapat dijadikan pengembangan khususnya bagi Ilmu Pemerintahan sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Secara praktis, di harapkan penelitian dapat bermanfaat untuk pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, di Kabupaten Purwakarta.

2.1Tinjauan Pustaka

2.1.1Pengertian Partisipasi

Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintahan baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni desa. Partisipasi yang menurut Inu Kencana Syafiie, dalam bukunya yang berjudul "*Sistem Pemerintahan Indonesia"*, sebagai berikut :

"Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorang individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama." (Inu Kencana Syafiie, 2002:132).Berdasarkan pendapat di atas maka partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu dalam suatu organisasi baik itu organisasi pemerintahan atau organisasi lainnya, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya sebagai tujuan bersama dan merupakan pemikiran dari beberapa individu bagi kemajuan organisasi yang menaunginya, karena perlu mempunyai tanggungjawab bersama dari setiap tujuan tersebut. Selain itu Ramlan Surbakti juga

memberikan defenisi partisipasi politik sebagai berikut:“Partisipasi merupakan salah salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.” (Surbakti, 1992: 140).Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan partisipasi merupakan sebuah aspek terpenting dalam suatuproses pelaksanaan demokrasi, karena pelaksanaan demokrasi sendiri dapat menentukan keputusan politik yang akan dibuat dan juga dilaksanakan pemerintah serta dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat selanjutnya.

2.1.2Pengertian Politik

Politik berasal dari kata Yunani *polis* yang berarti kota atau negara kota, kemudian arti itu berkembang menjadi *polites* yang berarti warga negara, *politeia* yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, *politika* yang berarti pemerintahan negara dan *politikos* yang berarti kewarganegaraan, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan, dan akhirnya kekuasaan. Politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaruh konflik yang menjadi konsensus nasional, serta kemudian kekuatan masa rakyat.

Partisipasi Politik

Pelaksanaan partisipasi dari warga negara dalam salah satu contoh keputusan yang dibuat oleh pemerintah yakni pemilihan umum di tingkat pusat dan di tingkat daerah disebut pemilihan kepala daerah. Pemilihan Kepala Daerah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya partisipasi politik dari masyarakat. Partisipasi politik menurut Mirriam Budiarjo yaitu:

> “Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk mengikuti untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak, mempengaruhi kebijakan pemerintahan.” (Budiarjo, 2008:367)

Menurut teori di atas partisipasi politik adalah kegiatan memilih pimpinan suatu kepala Negara maupun kepala Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Dengan pemilihan tersebut di harapkan masyarakat baik individu maupun kelompok dapat menyampaikan pendapatnya melalui partisipasi politik. Kegiatan tersebut seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi angota suatu partai, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

2.1.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi politik

Partisipasi politik, sebagai suatu aktivitas tentu banyak di pengaruhi oleh berbagai factor. Banyak pendapat yang menyoroti factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi polotik. Ada yang menyoroti factor-faktor dari dalam diri seseorang, ada yang yang menyoroti factor-faktor dari luar da nada yang menggabungkannya. Berbagai pendapat tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut.

Surbakti menyebutkan dua *variable* yang mempengaruhi tinggi rendahnya tinggkat partisipasi politik seseorang.

1. Aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran hak dan kewajiban seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapatkan jaminan sosial.
2. Menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksananya pemerintahan.

(Surbakti, 1991:15)

Menurut pendapat di atas aspek kesadaran politik meliputi kesadaran hak dan kewajiban warga Negara seperti hak dan kewajiban politik masyarakat mempunyai hak untuk memberikan suara dalam pemilu. Masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan finansial dan berkewajiban membayar pajak.

Sementara itu Arbi Sanit menyebutkan ada 4 faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia yaitu:

1. Adanya kebebasan berkompetisi di segala bidang, termasuk di bidang politik.
2. Adanya kenyataan berpolitik secara lugas dan terbuka.
3. Adanya keleluasaan untuk mengorganisasi diri, sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur.
4. Adanya penyebaran sumber daya poitik dalam masyarakat yang berupa kekayaan dalam masyarakat.

(Arbi Sanit, 2005)

Berdasarkan pendapat di atas, faktor-faktor yang mendorong partisipasi politik adalah adanya kebebasan berkompetisi, kenyataan berpolitik, keleluasaan mengatur diri dan mengatur partai politik, sumber daya masyarakat yang berkompeten di bidang dan kekuasaan yang seimbang.

2.1.5 MASYARAKAT DESA

Desa merupakan salah satu kesatuan terkecil masyarakat dimana masyarakat yang bermata pencaharian didominasi oleh pertanian. Tetapi penulis akan mengemukakan pengertian Desa secara umum. Pengertian Desa menurut Egon E. Berger, yang dikutup dari bukunya Rahardjo yang berjudul *"Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian"*, yaitu:

"Desa adalah setiap pemukiman para petani *(peasant)* sebenarnya faktor pertanian bukanlah ciri yng harus terlekat pada setiap desa. Ciri utama yang terlekat pada desa ditandai oleh keterkaitan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Keterkaitan terhadap wilayah ini di samping terutama untuk tempat tinggal, juga untuk menyangga kehidupan mereka" (Rahardjo, 1999:29).Menurut pendapat di atas, setiap pemukiman petani merupakan faktor pertanian dan bukanlah ciri-ciri yang melekat pada desa, sebenarnya ciri utama yang melekat pada desa di tandai adanya keterikatan warga masyarakat terhadap wilayahnya yang menjadi tempat tinggal dan mata pencaharian mereka.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan pengertian desa menurut Raharjdo dalam bukunya yang berjudul *"Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian"* yaitu:

"Desa dalam arti umum adalah desa sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini. sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada likalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhan, dan terutama yang tergantung kepada pertanian, desa-desa cenderung mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu yang sama" (Rahardjo, 1999: 28).

Bertolak dari pendapat di atas, desa dalam arti umum sebagai suatu gejala yang sangat umum yang ada di dunia, baik sebagai komunitas kecil baik dari tempat tinggalnya maupun pemenuhan kebutuhan dari mata pencaharian mereka yang sesuai dengan ciri-ciri yang sama dengan wilayah mereka.

Pengertian desa menurut Haw Widjaja dalam bukunya *"Pemerintahan Desa dan Marga"* adalah sebagai berikut :

"Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional berada di daerah Kabupaten" (Widjaja, 2002:65).Selanjutnya pengertian desa sama dengan nama marga sebagai berikut

:"Marga berasal dari serikat dusun-dusun atau kampung baik atas susunan masyarakat genealogis maupun masyarakat territorial, berdasarkan keturunan dan tempat dilahirkan. Masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang dilahirkan, dibesarkan, hidup dan bermata pencaharian dan meninggal dunia di tempat itu" (Widjaja, 2002: 66).

Bertolak dari pendapat di atas, maka penulis akan memberikan pengertian yang dimaksud dengan desa yakni: desa adalah suatu komunitas masyarakat kecil yang bertempat

tinggal pada wilayah tertentu dan bermata pencaharian sebagian besar sebagai petani, dan berhak mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar pada adat-istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat.

2.1.7 Pemilihan Umum Kepala Daerah

Secara universal pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan *(representative goverment)***. (**Dahl, 1992:33). Pemilihan umum disebut juga dengan *"political market"* sebagaimana yang diungkapkan Indria Samego25, artinya pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio), maupun audio visual (televisi), serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selembaran, bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau lobby yang berisi janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pillihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislative maupun eksekutif.

Berdasarkan PP. RI No. 6 Tahun 2005, Tentang pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Bab I berisi Ketentuan Umum menyebutkan :

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk memilih Kepala daerah dan Waikil Kepala Daerah.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah gubernur dan Wakil Gubernur untuk daerah Provinsi. Bupati dan Wakil Bupati untuk daerah Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk daerah kota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Daerah pemilihan adalah provinsi untuk Pemilihan gubernur/Wakil Gubernur dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati.
5. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan di provinsi dan/atau kabupaten/kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan tempat pemungutan suara.
8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
9. Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat.
10. Partai Politik adalah Partai Politik peserta pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun2003.
11. Gabungan Partai Politik adalah dua partai peserta Pemilihan Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu)

pasangan calon Kepal Daerah dan Wakil Daerah.

12. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon.
13. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewajiban membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
14. Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.
15. Pemantau pemilihan adalah pelaksana pemantauan pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPUD.

(PP. RI No. 6 Tahun 2005)

2.2 Kerangka Pemikiran

Partisipasi politik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu Negara.Karena merupaka salah satu bentuk untuk mengembangkan potensi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam berbagai kegiatan politik.

Mirriam Budiarjo mengemukakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut secara aktif dalam kegiatan berpolitik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan seperti ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah dan menjadi anggota suatu partai politik.

Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2012, dalam pemilihan Kepala Daerah yang baru tersebut masyarakat khususnya masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta turut berpartisipasi dengan mengikuti proses pemilihan Kepala Daerah, mengikuti sosialisasi yang tidak terlepas dari proses pemilihan Kepala Derah tahun 2012. Pemilu sebagai salah satu bentuk partisipasi politik yang paling banyak di ikuti oleh masyarakat yang mempunyai peran penting dalam proses perkembangan politik.

Selain mengikuti pemilihan Kepala daerah, menghadiri rapat umum juga merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Kegiatan rapat umum biasanya berbentuk diskusi formal yang berlokasi diinstansi pemerintahan tingkat kota maupun provinsi. Kegiatan ini diharapkan dapat diikuti oleh setiap kalangan dan semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta berhak mengikuti diskusi formal bersama pejabat pemerintahan.

Pejabat pemerintahan harus mampu berhubungan baik dengan masyarakat termasuk kepada masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, hubungan yang terjadi dapat melalui komunikasi secara langsung, menjadi tim sukses ataupun melakukan demonstrasi. Membina hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat di harapkan mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak para masyarakat.

Salah satu wadah utuk dapat membuat dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yaitu bergabung dengan salah satu partai politik. Partai politik sangat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik. Dengan salah satu fungsi partai politik yaitu rekrutmen dan melalui pendidikan partai di harapkan mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dan mewakili masyarakat untuk terlibat dalam partai.

Partisipasi politik merupakan hak seluruh masyarakat termasuk masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik seperti ikut serta dalam pemilihan umum, mengikuti rapat, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah, bergabung dengan partai politik dan lain-lain.

Partai politik sebagai wadah dalam menampung aspirasi masyarakat. Keberadaan Partai Politik di Kabupaten Purwakarta mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang di lakukan partai politik kepada masyarakat salah satunya dengan cara melibatkan masyarakat khususnya masyarakat Desa

Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta menjadi kader partai.

Partai politik tersebut dapat diharapkan mampu menampung dan menyalurkan aspirasi seluruh masyarakat khususnya Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta. Salah satunya dengan mengikut sertakan para masyarakat menjadi kader partai dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi politik di Kabupaten Purwakarta khususnya di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka definisi operasional dalam penelitian ini

1. Partisipasi Politik adalah Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Purwakarta, khususnya di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao.
2. Masyarakat adalah orang yang ikut serta dalam proses pemilihan umum kepala daerah di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta.
3. Partisipasi Politik Masyarakat adalah sekelompok masyarakat untuk ikut serta memilih pemimpin dalam proses pemilihan kepala daerah di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, yang terdiri unsur-unsur sebagai berikut:
    a. Pemberian suara pada pemilihan umum merupakan hak setiap masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta yang memenuhi syarat untuk memililih para calon kepala daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012.
        1) Proses pemberian suara adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Ciwareng melalui partisipasi politik dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012 di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta.
        2) Mengikuti sosialisasi adalah kegiatan politik masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta mengenai pemahaman tata cara pemilihan umum kepala daerah tahun 2012.
    b. Menghadiri rapat umum adalah kegiatan yang di lakukan para masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta di suatu tempat guna membahas masalah-masalah maupun mengajukan kebijakan yang berhubungan dengan masalah pemilihan kepala daerah tahun 2012 yang terdiri dari :
        1) Diskusi formal merupakan suatu kegiatan formal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ciwareng guna membahas mengenai keinginan serta usulan yang diinginkan terkait pemilihan umum kepala daerah tahun 2012.
        2) Lokasi adalah salah fasilitas yang digunakan sebagai tempat dilaksanakanya diskusi formal/rapat umum yang diikuti oleh masyarakat Desa Ciwareng Kabupaten Purwakarta.
    c. Hubungan pejabat pemerintah adalah interaksi sosial yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta dengan pejabat pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam hal partisipasi politik pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2012. yang terdiri dari :
        1) Komunikasi adalah salah satu alat/cara yang digunakan untuk dapat menjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pejabat pemerintah di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta.
        2) Tim Sukses adalah partisipasi masyarakat Desa

Ciwareng untuk turut serta membentuk sebuah tim yang berusaha mensukseskan para pasangan calon Kepala Daerah di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta.

3) Demontrasi merupakan suatu kegiatan anarkis yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta untuk menyampaikan pendapat serta keluhannya kepada pemerintah apabila haknya belum terpenuhi.

d. Menjadi anggota partai politik adalah suatu kegiatan yang dapat dinyatakan sebagai agen-agen mobilisasi politik, karena melalui kelompok ini anggota-anggota masyarakat dapat mengeluarkan berbagai gagasan dan mempertanyakan lewat system politik yang bersangkutan yang meliputi menjadi partisan, simpatisan dan kendala yang terdiri dari :

1) Simpatisan adalah ketertarikan yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta untuk turut berpartisipasi pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012.
2) Partisan adalah perilaku masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta yang merupakan aktivitas dalam hubunganya dengan rangsangan dari luar lingkungannya pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012.

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta

Desa adalah suatu daerah hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan sosial yang hidup serta tinggal menetap di suatu daerah-daerah tertentu dengan adat istiadat yang dijadikan landasan hukum mempunyai pemimpin formal yaitu Kepala Desa. Desa merupakan salah satu kesatuan terkecil masyarakat dimana masyarakat yang bermata pencaharian didominasi oleh pertanian, setiap pemukiman pertanian merupakan faktor pertanian dan bukanlah ciri-ciri yang melekat pada desa, sebenarnya ciri utama yang melekat pada desa ditandai adanya keterikatan warga masyarakat terhadap wilayahnya yang menjadi tempat tinggal dan mata pencaharian mereka. Desa Ciwareng merupakan salah satu Desa yang berada diwilayah Kecamatan Babakan Cikao dan merupakan salah satu wilayah pemekaran dari Kecamatan Babakan Cikao yang terbentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 24 Tahun 2009, 30 November 2000 tentang pembentukan dan susunan organisasi kecamatan Babakan Cikao. Desa Ciwareng yang berkedudukan di Ibu Kota Purwakarta, mempunyai luas wilayah 368 Ha dengan jumlah penduduk 7.568 jiwa. sebelah selatan desa ciwareng berbatasan dengan Desa Maracang, sedangkan di sebleah utara berbatasan langsung dengan Desa Mulyamekar.

Pemerintah Desa Ciwareng memiliki Visi sebagai berikut: “Terwujudnya Desa Ciwareng sebagai kota terdepan dalam pengembangan wilayah yang senantiasa memberikan pelayanan yang prima dan memberdayakan masyarakat yang berkarakter.”

Selain itu Desa Ciwareng pun memiliki Misi sebagai berikut:

1) Terwujudnya pelaksanaan kegiatan pendidikan, kesehatan, Agama,dan perekonomian.
2) Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur desa.
3) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
4) Memberdayakan masyarakat.
5) Mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ciwareng sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Desa merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan mencakup: Urusan Pemerintahan

yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Kelurahan, tugas pembangunan dari Pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa. Sebagai konsekwensi dari kedudukan dan kewenangan Desadalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di bidang Pemerintahan. Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di wilayahnya. Desa mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat.

3.1.2 Kegiatan Politik Masyarakat Desa Ciwareng Daerah Kabupaten Purwakarta

Masyarakat Desa Ciwareng adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao, dan turut serta dalam kegiatan organisasi berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Purwakarta No 24 tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Ciwareng yang merupakan salah satu Desa yang berada diwilayah Kecamatan Babakan Cikao. Masyarakat Desa Ciwareng berdomisili di kabupaten Purwakarta, dan melakukan kegiatan yang merupakan kegiatan pemerintahan maupun non pemerintahan.

Partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemulihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Dalam hal ini setiap sikap dan perilaku politik individu seyogyanya mendasari pada kehendak hati nurani secara suka rela dalam kontest kehidupan politik.

Sebagian besar masyarakat Desa Ciwareng berprofesi sebagai pegawai swasta, pegawai swasta biasa disebut sebagai karyawan yang bekerja di perseroan terbatas (PT). Masyarakat Desa Ciwareng ada pula yang bermata pencaharian sebagai petani, penghasil-penghasil pertanian di Desa Ciwareng mengerjakan tugasnya secara efektif dan tidak menjadikan bisnis yang bersifat mencari keuntungan.

Di Desa ciwareng terdapat sarana dan prasarana yang menunujang kegiatan maupun aktifitas masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan. Karena di Desa Ciwareng terdapat beberapa sekolah favorit guna memfasilitasi serta meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan masyarakat yang berada disekitar Desa Ciwareng Kabupaten Purwakarta.

Selain tersedianya sarana dan prasana yang menunjang masyarakat dibidang pendidikan, terdapat pula aktivitas mastarakat yang tergabung dalam organisasi PKK, yang salah satu kegiatanya mencakup mengadakan posyandu secara rutin khususnya untuk para balita di Desa Ciwareng Masyarakat Desa Ciwareng pada dasarnya telah terpengaruh dengan perkembangan globalisasi, terbukti dengan perkembangan teknologi yang pesat itu di dalam kehidupan masyarakat yang sudah menggunakan segala hal yang bersifat praktis untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tradisionalitas pada masyarakat Desa Ciwareng tidak nampak begitu signifikan dikarenakan keberadaan masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta.

3.1.3 Kegiatan Pemerintahan Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao

3.1.3.1 Bidang Pemerintahan Bagian Umum

Bagian Umum adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok Bagian Umum adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut di atas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi, antara lain:

1. Perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan bidang administrasi umum, pemerintahan, meliputi tata usaha dan keuangan pimpinan, perlengkapan dan rumah tangga
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang administrasi umum pemerintahan
3. Penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan

bidang administrasi umum pemerintahan
4. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tata usaha dan keuangan pimpinan, perlengkapan dan rumah tangga
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh asisten administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Bagian Umum, Kepala Bagian dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian, antara lain Sub Bagian TU dan Keuangan Pimpinan, Sub Bagian Perlengkapan, Sub Bagian Rumah Tangga. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

4.1 Proses Pemberian Suara Masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta Dalam Melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012

Partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2012 merupakan suatu perilaku politik yang di lakukan untuk dapat memberikan suaranya dan merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi merupakan masyarakat yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya, karena keputusan politik yang di buat dan dilaksanakan oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negaranya. Maka dari itu masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta berhak ikut serta menentukan proses pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2012 dengan cara memberikan hak suaranya.

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek yang paling penting dari demokrasi. Dengan adanya otonomi daerah yang merupakan konsep desentrilisasi memiliki tujuan agar masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2012. Kesempatan berpartisipasi yang lebih besar bagi masyarakat merupakan konsekuensi dari pengambilan keputusan oleh pemerintah Nasional kepada Pemerintah Lokal. Dalam hal ini kekuasan di serahkan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta untuk dapat melaksanakan pemilihan umum kepala daerah.

Kesadaran politik masyarakat dalam berpartisipasi memberikan suaranya pada pemilihan umum daerah tahun 2012 merupakan salah satu factor yang terpenting dalam kegiatan berpolitik. Sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat, serta kegiatan politik menjadi tolak ukur seseorang untuk dapat terlibat dalam pemberian suara melalui partisipasi politik dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012 di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta.

Masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta merupakan objek dalam kegiatan politik dalam pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2012. Dalam melakukan partisipasinya masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta mebutuhkan pembinaan khusus agar lebih dapat memahami mengenai proses pemberian suara yang harus dilakukanya, hal tersebut dilakukan pula untuk menumbuhkan potensi serta kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibanya. Sehingga dapat menguranggi tinggkat partisipasi masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemberian suaranya pada partisipasi politik pemilihan Kepala Daerah tahun 2012.

4.2 Keikutsertaan Menghadiri Rapat Umum Masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012

Partisipasi politik masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta dalam turut serta melakukan rapat umum terkait pemilihan kepala daerah tahun 2012, yang berkenaan dengan masalah politik di dalam forum formal yang merupakan diskusi politik yang di lakukan di dalam rapat-rapat dalam institusi pemerintah seperti di balai kota dan dinas social.

Rapat umum adalah kegiatan yang di lakukan para masyarakat Desa Ciwareng

Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta di suatu tempat guna membahas masalah-masalah maupun mengajukan kebijakan yang berhubungan dengan masalah pemilihan kepala daerah tahun 2012. Dalam perumusan kebijakan masyarakat mempunyai hak untuk berpendapat dan memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan tentang partisipasi politik masyarakat mengenai pemilihan umum kepala daerah di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2012.

Rapat umum terdapat diskusi formal yang membahas para calon kepala daerah serta aktifitas yang dilakukan oleh para calon kepala daerah selama masa kampanye berlangsung. Dalam diskusi formal masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya mengenai keinginan serta usulan yang diinginkan dari para calon kepala daerah khususnya untuk kepala daerah yang terpilih, agar dapat menerapkan visi dan misinya dengan baik.

Kegiatan yang dilakukan dalam diskusi formal merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan masyarakat, agar masyarakat lebih mengetahui seluruh infornasi terkait pemilihan kepala daerah tahun 2012 secara terbuka. Pemerintah memberikan wadah kepada masyarakat ke pada masyarakat melalui diskusi formal, agar masyarakat lebih memahami mengenai masing-masing para calon kepla daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta bapak Zailudin, mengatakan bahwa: “saya sering mendapatkan undangan dari dinas social untuk membahas perda keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2012. Dan menurut saya hal tersebut sanggat menarik untuk meningkatkan pemahaman politik untuk masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui jika masyarakat Desa Ciwareng dilibatkan dalam diskusi dan rapat formal guna membahas keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2012. Dilihat dari table 3.2 jumlah masyarakat yang dapat melakukan pemilihan kepala daerah tahun 2012 berjumlah5722 jiwa, akan tetapi masyarakat yang mendapatkan undangan untuk dapat menghadiri rapat umum hanya kurang dari 100 jiwa, ini dapat menguranggi partisipasi masyarakat Desa Ciwareng Kabupaten Purwakarta dalam melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2012 lalu. Masyarakat mempunyai peranan sangat penting dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2012 lalu, masyarakat juga dilibatkan dalam perumusan dan pembuatan kebijakan. Dilibatkannya masyarakat dalam perumusan kebijakan bertujuan agar masyarakat dapat turut serta dalam melakukan partisipasi politik pada pemilihan umum kepala daerah di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang masyarakat di Desa Ciwareng yang bernama Ibu Siti menyatakan bahwa: “keikutsertaan masyarakat dalam menghadiri rapat umum merupakan suatu partisipasi politik guna membahas mengenai para calon kepala daerah dan dengan hadirnya mereka akan sangat membantu jalannya proses pemilihan kepala daerah”

Dari hasil wawancara di atas membenarkan bahwasanya dengan adanya masyarakat yang di undang oleh dinas *social* untuk turut serta dalam menghadiri rapat umum sangat berpengauh terhadap jalannya proses pemilihan kepala daerah tahun 2012 pada saat itu.

Aktivitas yang di lakukan oleh masyarakat dengan menghadiri-menghadiri rapat umum serta diskusi yang terkait pemilihan calon kepala daerah tahun 2012 di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta dilakukan guna memperoleh informasi mengenai hal yang berkaitan dengan aktivitas menjelang pemilihan kepala daerah.

Kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta dengan menghadiri diskusi formal diperuntukan untuk seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah. Rapat dan diskusi formal yang di lakukan sudah seharusnya menjadi jembatan guna menunjang komuniksi serta kerjasama yang baik dan harmonis antara pihak yang terlibat agar tidak terjadi kesimpang

siuran informasi yang dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa di rugikan.

Hubungan Pejabat Pemerintah (DPRD) Dengan Masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012

Hubungan masyarakat dengan pejabat-pejabat pemerintah adalah interaksi sosial yang di lakukan para masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta dengan pejabat pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam hal partisipasi politik pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2012. Hubungan ini terjadi dalam rangka memberikan usul atau masukan kepada pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta untuk menunjang terselenggaranya partisipasi politik yang baik dari masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2012.

Salah satu cara yang digunakan untuk dapat menjalin hubungan yang baik dengan pejabat pemerintah setempat adalah dengan melakukan komunikasi yang baik. Komunikasi yang di lakukan masyarakat khususnya di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta terbagi menjadi dua, yakni Penyampaian pendapat secara *persuasive* yang dilakukan dengan cara menyampaikan pendapat secara baik serta penyampaian yang dilakukan dengan cara aksi unjuk rasa/demonstrasi.

Komunikasi adalah interaksi yang di lakukan masyarakat Kabupaten Purwakarta dengan pejabat Kabupaten Purwakarta untuk menyampaikan usulan serta pendapatnya secara baik, Guna terselenggaranya hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pejabat pemerintahan sekitar. Jika komunikasi yang terjalin dapat terlaksana dengan baik serta harmonis, maka hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap proses pemilihan umum kepala daerah di desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta yang bernama Bapak Zamaludin, mengatakan bahwa: “selama ini hubungan masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan kepala daerah yang baru masih sangat kurang, ini mengingat tugas dari para pemerintahan Kabupaten Purwakarta juga banyak, sehingga mereka juga masih sulit di ajak berkomunikasi dengan masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara di atas jelas sekali jika pemerintah masih susah untuk diajak berkomunikasi dengan masyarakat Kabupaten Purwakarta mengenai proses pemilihan kepala daerah di tempat mereka di karenakan banyaknya pekerjaan. Akan tetapi ini sangat di sayangkan mengingat komunikasi sangatlah di butuhkan agar pelakasanaan pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan dengan baik.

Sebagai seorang pejabat pemerintahan sebaiknya lebih meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk dapat menjaga serta silaturahmi dengan masyarakat. Sesibuk apapun juga kegiatan yang dilakukan oleh pejbat pemerintahan tentu mereka masih memliliki waktu luang, karena untuk berkominikasi dengan masyarakat tidak memerlukan waktu yang sangat lama juga. Dengan kehadiranya saja masyarakat akan sangat merasa senang, apalagi jika dapat berkomunikasi lebih lanjut dengan pejabat pemerintahan tersebut.

Sedangkan hasil wawancara dari petugas KPU, Bapak Tatang mengatakan bahwa: “memang dari pihak pemerintahan terkadang susah untuk di ajak bertemu dengan masyarakat, ini di karenakan jadwal dan tugas mereka yang banyak. Malah terkadang Kepala pemerintah Kabupaten menyuruh asistennya untuk menghadiri rapat dengan para masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas membetulkan pendapat dari masyarakat tentang susahnya berkomunikasi dengan para pejabat pemerintah. Tugas pemerintah yang sangat banyak di duga mempengaruhi mereka sehingga tidak bisa menghadiri pertemuan dengan para masyarakat. Padahal pastinya mereka mempunyai waktu luang untuk dapat bertemu dengan masyarakat karena berkomunikasi dengan masyarakat merupakan salah satu kewajiban dari pejabat pemerintahan untuk lebih mengetahui keinginan serta harapan

masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta.

Selain komunikasi, salah satu bentuk partisipasi politik yaitu dengan membentuk tim sukses dari masing-masing calon kepala daerah guna terselenggaranya proses pemilihan umum kepala daerah tahun 2012 di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta.

Kampanye adalah bentuk komunikasi bagi kandidat calon kepala daerah tahun 2012 untuk mempengaruhi masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah melalui pemberian suara. Berpartisipasi dalam kampanye dengan bergabung menjadi tim sukses suatu partai politik atau calon kepala daerah tentu memerlukan suatu kemampuan tersendiri. Salah memiliki kemampuan komunikasi kepada komunikan yang merupakan masyarakat awam untuk menyampaikan visi dan misi partai politk atau calon kepala daerah serta mempunyai kemampuan retorika untuk mendapatkan perhatian masyarakat yang pada giliranya tertarik untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Yang pada giliranya tertarik untuk mendukung partai politik atau calon kepala daerah yang mereka usung.

Menjadi Anggota Partai Politik Masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2012

Keterlibatan masyarakat dalam menjadi anggota partai politik di Kabupaten Purwakarta belum begitu banyak untuk dapat berpartisipasi. Hal ini di karenakan masyarakat kurang begitu merespon ajakan para partai politik untuk bergabung menjadi anggota partai. Ini di sebabkan kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai keterlibatan mereka dalam partai politik. Banyak factor yang menyebabkan mereka enggan menjadi anggota suatu partai politik.

Menjadi anggota partai politik merupakan pilihan yang di ambil oleh seorang masyarakat untuk bergabung dalam suatu partai politik. Dalam hal ini masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta mempunyai hak yang sama untuk bergabung menjadi anggota partai politik. Akan tetapi banyak masyarakat yang sudah nyaman sebagai masyarakat biasa sehingga enggan bergabung menjadi anggota salah satu partai politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta Ibu Siti, mengatakan bahwa: “saya tidak terlalu tertarik untuk menjadi salah satu anggota partai politik dikarenakan saya dengar harus mengelontorkan sejumlah uang serta selama ini anggapan terhadap anggapan terhadap partai politik sangat buruk.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kurangnya partisipasi masyarakat untuk dapat bergabung menjadi salah satu anggota partai politik dikarenakan berbagai macam alasan. Salah satunya yaitu opini yang menyebar ke masyarakat bahwa untuk menjadi anggota partai politik diperlukan biyaya serta banyaknya permasalahan yang timbul jika seseorang telah menjadi anggota suatu partai.

Buruknya pandangan masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta terhadap partai politik mengakibatkan mereka tidak terlalu berminat untuk menjadi salah satu anggota partai politik.

Keterlibatan masyarakat dalam suatu partai politik dapat dilihat salah satunya melalui kegiatan partisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta. Partisan adalah perilaku yang memberikan pemikiran terhadap masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta.

Perilaku merupakan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang berhubungan dengan prosoes pemilihan umum kepala daerah tahun 2012. Prilaku yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan partisan di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta yakni dengan aktivitas mengikuti organisasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota politik, Bapak Nana mengatakan bahwa: “partai kami terbuka untuk siapa saja, selama dia berpotensi dan memiliki kemampuan. Kita akan memeberikan kesempatan selama mengikuti prosedur yang berlaku. Untuk menjadi kader partai yaitu

pertama muda dan yang kedua ia memahami mengenai visi dan misi partai kami."

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa untuk menjadi salah satu kader partai syarat yang pertama adalah muda, sementara itu masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta yang sudah lanjut usia tidak dapat turut serta untuk berpartisipasi menjadi anggota partai politik. Hal tersebut memberikan anggapan bahwa masyarakat lanjut usia sudah tidak dapat melakukan partisan dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2012.

Selain partisan salah satu bentuk partisipasi politik adalah bergabung dengan organisasi politik untuk menjadi simpatisan. Mengikuti organisasi biasanya bertujuan untuk turut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Organisasi-organisasi politik dan organisasi masyarakat seringkali memiliki tujuan yang tidak saja bersifat umum, akan tetapi juga memiliki tujuan khusus yang diperuntukan bagi kepentingan partainya.

Partisipasi politik masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta dengan menjadi simpatisan merupakan partisipasi yang aktif dalam berorganisasi politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang yang bernama Bapak Zamaludin, mengatakan bahwa: "Saya menjadi simpatisan dalam pemilihan umum kepala daerah di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta karena saya tertarik untuk mengikuti organisasi politik serta ingin turut serta dalam proses pemilihan umum kepala daerah tahun 2012."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa simpatisan yang terlibat dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2012 di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta merupakan masyarakat yang tertarik akan organisasi politik. Namun sangat di sayangkan bahwa faktanya masih banyak masyarkat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta yang tidak berminat menjadi partisipan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta yang bernama Ibu Wiwi, mengatakan bahwa: "saya tidak tertarik untuk menjadi simpatisan dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2012 kemarin, karena saya merasa lebih nyaman menjadi masyarakat biasa, dan sebagai simpatisan tentunya waktu saya akan banyak tersita oleh kegiatan politik".

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa dengan keterlibatannya dalam turut serta menjadi anggota simpatisan akan banyak membuang waktunya dan kegiatannya serta pekerjaannya sehari-hari menjadi terganggu serta beberapa masyarakat enggan menjadi anggota partai politik di karenakan mereka sudah merasa nyaman menjadi masyarakat biasa. Lalu adapula kendala untuk menjadi salah satu anggota partai politik sehingga membuat masyarakat kurang ikut serta menjadi anggota partai politik.

Partisipasi dalam organisasi politik ini merupakan partisipasi yang aktif. Partisipasi dalam partai politik dan mengambil bentuk yang aktif atau yang pasif tersusun mulai dari menduduki jabatan dalam organisasi sedemikian rupa. Beberapa partai Politik pun menanggapi positif masyarakat yang ingin menjadi anggota partai politik.

Aktif dalam partai politik dan kelompok kepentingan merupakan salah satu bentuk partisipasi politik dan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Karena dalam semakin seringnya masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta yang aktif dalam partai politik maka masyarakat akan semakin mengerti dan mengetahui masalah-masalah politik serta mampu menyampaikan aspirasinya melalui partai politik. Namun untuk menjadi anggota parpol bukanlah hal yang mudah bagi beberpa masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, Bapak Aldi (cubel) mengatakan bahwa: "salah satu kendala untuk menjadi anggota partai politik adalah waktu yang bersamaan dengan jam kerja saya serta masyarakat biasa seperti saya kurang menarik

perhatian dibandingkan dari masyarakat dari kalangan artis atau pengusaha .”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa partai potik kurang mendukung masyarakat umum untuk bergabung menjadi anggota partai.karena partai politik lebih melihat kualitas seseorang di masyarakat sehingga diharapkan mampu mendapatkan dukungan dari masyarakat, hal ini berbeda dengan masyarakat umum yang belum mendapatkan dukungan penuh dari partai politik maupun dari masyarakat.

Ini juga akan berakibat kepada masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta yang sudah lanjut usia akan mengalami kesulitan menjadi anggota partai. Keterbatasan yang mereka punya akan menjadi penghalang besar untuk bergabung menjadi anggota partai politik. Daya jual masyarakat lanjut usiapun masih kalah dengan masyarakat kalangan artis yang sangat mudah dijadikan anggota partai, karena mempunyai daya jual yang lebih.

Sejauh ini partisipasi masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta untuk terlibat dalam partai politik pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2012 belum dapat menarik perhatian sebagian masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masih banyak kegiatan partisan yang belum berjalan dengan baik serta kurang adanya kesadaran masyarakat untuk dapat terlibat sebagai simpatisan sehingga hal tersebut belum dapat meningkatkan partisipasi politik untuk turut serta menjdi anggota salah satu partai politik dalam proses pemilihan umum kepala daerah di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta ta